

## TAJUK RENCANA

### Menghalau Korona Jelang Libur Nataru

**TIDAK** diingkari bila rapid, swab dan vaksin, masih menjadi kosakata paling populer di Indonesia menyusul kehadiran Korona dan Covid-19. Bagaimana tidak? Merebak sejak 9 bulan silam, angka kasus di negeri ini tidak menunjukkan penurunan.

Sejenak menengok ke belakang, akan bisa kita tahu bagaimana melewatinya perjalanan virus Korona tersebut. Kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi pada 3 Maret dan di Yogyakarta secara resmi diumumkan 15 Maret, saat virus menghampiri balita 3 tahun yang baru diajak orang tuanya berkunjung ke Depok Jawa Barat. Sebulan kemudian, di DIY angkanya sudah menjadi 62. Sementara secara nasional per 3 April sudah menjadi 1.986 dan tersebar di 32 provinsi. Dan kini secara nasional, data 20 Desember menyebutkan angka pasien positif 657.946 dan di DIY angkanya mencapai 9.257.

Peningkatan kasus Korona sangat mengkhawatirkan semua pihak. Realitanya kian memprihatinkan ketika pelbagai survei menyebutkan hambatan utama pemutusan rantai penyebaran virus adalah ketidakpedulian masyarakat akan bahaya Covid-19. Cara pandang fatalistik yang menyebut bahwa *mati adalah takdir Allah* hingga alasan ekonomi terungkap. Dan kini, banyak daerah menjadi zona merah.

Upaya keras menghalau Korona menjelang libur natal dan tahun baru (nataru) menghadirkan kebijakan serta kosakata baru, rapid test antigen. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengeluarkan keputusan Menteri mengenai penggunaan rapid test antigen bagi pelaku perjalanan. Meski tidak bermaksud mempersulit wisatawan dan pemudik namun Sekda DIY Baskara Aji semua ini demi kepentingan warga dan keluarga (KR, 18/12).

Bukan bermaksud melarang datang dan berkunjung, jika DIY kemudian mengikuti keputusan pusat mengenai wajib rapid test antigen sebagai syarat memasuki wilayah ini. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X mengemukakan, karena sudah menjadi keputusan pusat maka mau tidak mau harus dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan nasional. Meski kebijakan baru disebut Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHG-MA) ini menyebabkan terjadinya tidak sedikit pembatalan reservasi. (KR, 19/12).

Banyak cara harus ditempuh pemerintah daerah untuk 'mengamankan' warga ketika penularan virus Korona tidak kunjung mereda. Di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang lebih tegas dengan menutup pasar setiap Jumat dan objek wisata pada setiap Kamis Jumat. Sementara Kabupaten Blora akan menerapkan jam malam. Kedua wilayah yang bertetangga di Pantura Timur Jawa Tengah itu kini masuk zona merah. (KR, 20/12)

Vaksin memang sudah ada. Namun vaksinasi baru akan dilakukan Januari mendatang. Sementara libur panjang sudah ada di depan mata. Masa yang ditunggu dan mestinya menjadi 'musim panen' bagi pariwisata, pedagang, kuliner dan sejenisnya. Akankah kebijakan rapid tes antigen akan menyuramkan harapan mereka?

Pandemi jangan membuat kehidupan berhenti. Ekonomi juga jangan sampai membeku. Kini tinggal kesadaran warga untuk taat dalam menjaga diri dan lingkungan dengan menerapkan 3M dilengkapi 3W : wajib taat beribadah, wajib taat prokes dan wajib menjaga imunitas. Serta 3T : *testing, tracing and treatment*. Pemerintah sudah melakukan maksimal. Biarlah juga memikirkan yang lain. Masih banyak 'PR' untuk menyejahterakan warganya. □

# Menjaga Ibu, Menjaga Sebuah Generasi

**SETIAP** 22 Desember Bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu. Berbeda dengan *mother's day* yang hanya merupakan ekspresi penghormatan, cinta dan terimakasih kepada perempuan yang telah melahirkan dan merawat kita, yaitu ibu. Hari ibu di Indonesia memiliki makna yang lebih luas. Hari Ibu menjadi penciri moment kebangkitan perempuan dalam menggagalkan persatuan dan kesatuan perjuangan yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Bangsa Indonesia. Sering tidak kasat mata, tapi sebenarnya menjadi kekuatan pendukung yang memiliki peranan sangat penting.

Adalah Presiden Soekarno yang pada tahun 1959 menetapkan 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Kini, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, setelah 92 tahun sejak peristiwa bersejarah itu berlalu. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah bicara peran perempuan kaitannya dengan kemerdekaan masih relevan sekarang? Bukankah Indonesia sudah puluhan tahun merdeka?

Kalau memandang kemerdekaan dari perspektif politik, maka 75 tahun lebih telah berdiri dan masih berdiri sebuah negara yang berdaulat bernama NKRI. Tapi apakah kemerdekaan yang dimiliki negara ini betul-betul sebuah kemerdekaan? Kalau kita mau jujur, kita harus mengakui, betapa kenyataannya negara tercinta ini belum merdeka.

**Membelenggu**  
Begitu banyak hal yang membelenggu kemerdekaan. Utang negeri yang terus meningkat jumlahnya, kemiskinan yang tidak juga turun secara signifikan, pengangguran yang terus bertambah, kebocoran dana pembangunan, dan yang paling kasat mata membelenggu kedaulatan negara ini adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dilakukan pejabat publik yang dilakukan secara massif, di hampir semua sektor, di hampir semua

### Ane Permatasari

level pemerintahan. Hingga membuat negara ini seperti kapal besar yang bocor dan siap untuk karam sewaktu-waktu.

Jadi, kalau dulu, para ibu bangsa berperan dalam usaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, maka sekarang tugas berat mereka adalah berperan dalam membersihkan bangsa ini dari anasir-anasir negatif yang meru-



KR-JOKO SANTOSO

saknya. Membersihkan kapal besar bangsa ini dari penumpang-penumpang gelap yang hanya mengambil keuntungan dari bangsa ini untuk dirinya dan kelompoknya, tanpa pernah memikirkan nasib bangsa ini ke depan.

Caranya? Menarik mencermati sebuah video yang sempat viral tentang ajakan kepada para ibu pada moment hari ibu untuk tidak mengharapkan pesan cinta dari anak-anaknya. Tapi sebaliknya justru memberikan pesan cinta kepada anak-anaknya untuk tidak menjadi koruptor. Kelihatannya hanya sebuah tayangan ringan, tapi coba kita bayangkan. Seorang ibu adalah madra-

sah pertama dan utama. Kalau setiap ibu menyampaikan pesan ini kepada anak-anaknya, mengedukasi anak-anaknya tentang pentingnya integritas selama masa tumbuh kembangnya, maka *Insha Allah* akan terbentuk generasi penerus yang berintegritas. Pada gilirannya nanti akan menggantikan generasi sekarang yang mungkin memang sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan berubah. Karenanya, penting bagi para ibu untuk mulai mengenalkan nilai-nilai integritas kepada anak-anaknya. Tentang cinta tanah air dan negara.

### Ketahanan Keluarga

Masalahnya, di masa pandemi banyak masalah yang berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga. Tekanan ekonomi misalnya, sering berdampak pada perilaku kekerasan yang akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku ibu. Juga kesadarannya sebagai seorang ibu sosok yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya. Berkali-kali media memberitakan kekerasan yang dilakukan seorang ibu pada masa pandemi ini kepada anak-anaknya. Kita semua harus sadar, untuk bisa menjalankan perannya, seorang ibu juga butuh dukungan. Bukan hanya dari keluarganya, tapi juga dari negara. Negara harus bisa melindungi kaum perempuan, kaum ibu, dimanapun mereka berada.

Kalau mendidik ibu berarti mendidik sebuah generasi. Maka menjaga dan melindungi seorang ibu berarti juga menjaga dan melindungi sebuah generasi. □

\*) **Dr Ane Permatasari, Dosen Fisipol UMY**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## UMKM dan Program 'si Bakul Jogja'

**SALAH** satu terobosan yang dikembangkan Pemerintah DIY untuk membantu mempercepat upaya pemulihan UMKM adalah program 'si Bakul Jogja'. Program ini simpel, namun dampaknya sangat signifikan. Dengan cara menjalin kerja sama dengan Gojek dan Grab, Pemerintah DIY membebaskan ongkos kirim untuk produk-produk UMKM (KR, 17/12).

Upaya yang dilakukan Pemerintah DIY ini, selain membantu kelancaran pengiriman produk-produk UMKM yang berasal dari Jogjakarta, juga sekaligus untuk membantu pemasaran produk UMKM agar lebih mampu bersaing di pasar yang makin kompetitif. Dengan membebaskan ongkos kirim, harga berbagai produk UMKM dari DIY akan lebih mampu bersaing.

**Digitalisasi UMKM**  
Selama pandemi Covid-19, nasib UMKM di DIY sedang di ujung tanduk. Ketika sektor pariwisata kolaps karena pandemi Covid-19, tidak sedikit pelaku UMKM di DIY gulung tikar, hilangnya pembeli. Wisatawan ke DIY tidak lagi sebanyak sebelumnya. Bahkan sepanjang tahun 2020 boleh dikata kunjungan wisatawan benar-benar turun drastis.

Program digitalisasi UMKM dikembangkan pemerintah. Meski terbukti berperan mendorong kembali arus pesanan produk-produk UMKM dari DIY, tetapi, hasilnya belum benar-benar signifikan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang masih gaptek beradaptasi dengan teknologi informasi dan internet. Sehingga dalam praktiknya mereka cenderung menjadi korban dari adanya kesenjangan digital.

Pelaku UMKM yang gagap bersaing memasarkan produk lewat internet, harus puas hanya menjadi penonton. Bagi pelaku UMKM yang bermodal besar dan memiliki literasi digital yang mumpuni, mereka dapat memanfaatkan

### Bagong Suyanto

situasi dan bahkan memperluas pangsa pasar dengan cara pemasaran daring. Tetapi, lain soal bagi pelaku UMKM yang akses dan kemampuannya mengelola dunia maya masih pas-pasan.

Lebih dari sekadar kemampuan memanfaatkan gawai untuk pemasaran produk. Upaya digitalisasi UMKM juga membutuhkan dukungan peranti lain, seperti kemampuan memfoto dan menampilkan produk dari sisi yang menarik, kebiasaan bertransaksi melalui dunia maya dengan birokratis, kemampuan beradaptasi dengan sistem pembayaran non-bank melalui QRIS, dan lain sebagainya. Bagi pelaku UMKM yang tradisional dan konvensional, praktik digitalisasi UMKM membutuhkan proses adaptasi yang tidak jarang lama.

**Prasyarat**  
Melalui program 'si Bakul Jogja', harapan Pemerintah DIY tentunya dapat menjadi angin segar untuk mendorong kembali gairah UMKM, yang

ternyata lebih banyak dimanfaatkan pelaku UMKM mapan. Sementara UMKM yang masih gagap memanfaatkan teknologi informasi dan tidak pula memiliki modal, hanya menjadi penonton terpinggirkan.

Kedua, bagaimana memastikan agar program 'si Bakul Jogja' tidak berdampak kontra-produktif bagi revitalisasi pariwisata DIY. Jangan sampai terjadi, akibat proses pembelian produk-produk UMKM, terutama souvenir dan oleh-oleh khas Jogja, bisa dipesan dengan mudah secara daring, lantas animo masyarakat untuk berkunjung ke DIY menjadi berkurang.

Maka, tak kalah penting adalah tetap mempromosikan daya tarik daerah tujuan wisata DIY agar arus wisatawan dapat kembali pulih. Bagi pelaku UMKM, penopang kelangsungan usaha mereka adalah sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan. Tanpa adanya kunjungan wisatawan, jangan kaget, UMKM terancam kolaps. □

\*) **Prof Dr Bagong Suyanto, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga**

## Pojok KR

Tanah bergerak, lebih 100 rumah rusak  
-- **Semoga tidak ada korban jiwa** \*\*\*  
Zona merah, Rembang tutup pasar, Blora berlakukan jam malam  
-- **Semua mencoba maksimal menjaga keselamatan warga** \*\*\*  
Perceraian di DIY mencapai 5.700 kasus setahun  
-- **Bina Keluarga Bahagia, perlu lebih di-gaungkan**



**Pikiran Pembaca**  
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotocopy atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

### Rumah Data Kependudukan

**RUMAH** Data Kependudukan (RDK) yang diluncurkan oleh BKKBN tahun 2017 yang mengiringi hadirnya Kampung KB pada tahun 2016, pada tahun 2020 ini telah berubah nama menjadi Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RDKIK). Perubahan nama ini mengiringi perubahan nama Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 843.4/2879/SJ Tahun 2020 tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.

RDKIK pada dasarnya merupakan kelompok kegiatan (poktan) masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kalurahan. Dengan demikian, RDKIK selain merupakan pusat basis data dan informasi Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), juga merupakan pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro Kampung KB yang sekarang berbasis di tingkat desa/kalurahan.

Latar belakang pendirian RDKIK adalah bahwa tersedianya data dan informasi kependudukan yang valid, terkini dan terpercaya menjadi kebutuhan yang krusial dalam perencanaan dan intervensi pembangunan. Seiring dengan pemberlakuan

UU No 6 tentang Desa, di mana desa/kalurahan mempunyai otoritas dalam melaksanakan perencanaan dan intervensi pembangunan, maka sangat dibutuhkan data dan informasi kependudukan di tingkat desa yang memudahkan perangkat desa dalam melakukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Mengingat akan kebutuhan data tersebut, RDKIK dibentuk dan dikembangkan. RDKIK hadir sebagai pusat data dan informasi Bangsa Kencana di tingkat mikro dengan basis partisipasi masyarakat, yang secara eksplisit menjadikan data-data yang dihasilkan sebagai sebuah artikelisasi kepentingan dari masyarakat secara luas.

RDKIK yang berbentuk kelompok kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat fungsional dalam rangka penyediaan data kependudukan yang valid dan terbarukan melalui skema dari, oleh dan untuk masyarakat, berkedudukan sebagai kelompok kegiatan yang berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, ia merupakan bagian dari sistem pembangunan kependudukan, yang produknya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder (pemerintah, masyarakat sipil atau swasta) untuk meningkatkan akurasi intervensi pembangunan masyarakat.

\*) **Drs Mardiyah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.**

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Arsul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkry23@yahoo.com](mailto:iklankrkry23@yahoo.com), [iklankrkry13@gmail.com](mailto:iklankrkry13@gmail.com).  
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga..Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%